

pengetahuan dan teknologi akan bertolak dari konsep teosentris, oleh karena itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bersifat *value free*, tetapi *valuebound*, sehingga proses penemuan, pencarian dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan realisasi dari misi kekhalifahan dan pengabdian manusia kepada Allah untuk mencari ridha-Nya di akhirat kelak.

Menurut Amin Abdullah yang dikutip oleh Zainuddin, bahwa sejarah kependidikan Islam telah terbelah menjadi dua wajah, yaitu paradigm *integralistik-ensiklopedik* dan paradigma *spesifik-paternalistik*. Paradigma pengembangan keilmuan yang *integralistik-ensiklopedik* ditokohi oleh ilmuwan muslim seperti, Ibn Sina, Ibn Rusyd, dan Ibn Khaldun. Sementara yang *spesifik-paternalistik* diwakili oleh ahli Hadits dan ahli Fiqh. Keterpisahan secara diametral antara keduanya atau dikotomis, dan sebab lain yang bersifat politis ekonomis berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan dan kemunduran dunia Islam saat itu. Oleh karena itu, Amin Abdullah menawarkan gerakan *approachment* (gerakan untuk saling menerima keberadaan yang lain dengan lapang dada).²

Kehidupan yang Islami diperlukan adanya bangunan *ontology*, *epistimologi dan aksiologi* ilmu pengetahuan yang tidak hanya meyakini kebenaran *sensual indrawi dan rasional logic*, namun juga harus

²M. Zainuddin, "UIN: Menuju Integrasi Ilmu dan Agama" dalam M. Zainuddin ,dkk., editor, *Memadu Sains dan Agama Menuju Universitas Islam Masa Depan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 5.

alam semesta ini dan hukum-hukumnya serta temuan ilmu pengetahuan kearah kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu integrasi ilmu dan agama tidak dapat dilakukan secara formalitas dengan memberikan justifikasi ayat-ayat al-Qur'an pada setiap penemuan ilmu pengetahuan, atau hanya dengan menghubungkan ayat-ayat Allah dengan ilmu pengetahuan yang sudah lama dikaji dan diterapkan manusia dalam tatanan kehidupan di alam jagad raya ini.

Namun yang terpenting adalah adanya perubahan paradigma pada basis keilmuan Barat, agar sesuai dengan khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan realitas metafisik, religious dan teks suci. Begitu juga sebuah epistemologi akan bersifat eksploratif dan merusak jika tidak didasarkan pada ontologi yang Islami. Sebaliknya bangunan ilmu yang sudah terintegrasi tidak banyak berarti jika dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, untuk itulah aspek ontologi suatu ilmu harus ditata dan dirumuskan secara tepat agar bermanfaat dalam tatanan kehidupan manusia.⁵

Dengan demikian pengembangan pendidikan Islam harus bertolak pada kontruk pemikiran atau epistemologi bahwa ajaran dan nilai-nilai Ilahi merupakan sumber konsultasi dan didudukkan sebagai *furqon, hudan dan rahmah*. Sedang yang bersifat horizontal (konsep, teori, temuan, pendapat dan sebagainya) dalam posisi sejajar, selanjutnya

⁵A. Khudlori Sholeh “ *Pokok Pikiran Tentang Paradigma Integrasi Ilmu dan Agama*” Dalam M. Lutfi Musthofa, Helmi Syaifuddin (Editor) *Intelektualitas Islam Melacak Akar-Akar Integrasi Ilmu dan Agama* (Malang: Lembaga Kajian Al-Qur'andan Sain UIN Malang, 2006) 231-132.

Kedua, holistic trnasformative education, yakni pembakuan materi al-Islam di sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad dan yayasan-yasan Islam lainnya yang mendirikan lembaga pendidikan dengan identitas sekolah, sebagaimana yang dirintis oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah pada tahun 2000 an yang lebih populer dengan “*gerakan ilmu*”³⁶. Sekolah Muhammadiyah misalnya, disamping muatan kurikulum dengan standar BSNP, juga ada muatan wajib al-Islam dan Kemuhammadiyah. Menurut Mohamad Ali, mata pelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan ciri khas pendidikan Muhammadiyah. Karena mata pelajaran ini menjadi ciri khas, maka ia menjadi “Identitas objektif” yang diterima publik di luar Muhammadiyah.³⁷ Sementara, NU membentuk lembaga pendidikan yang dinamakan Ma’arif yang bertugas melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan formal seperti sekolah, madrasah dan pondok pesantren dengan maksud mengembangkan apa yang dikonsepsikan sebagai “*SNP-Plus*”, yaitu memiliki standar nasional pendidikan (SNP) ditambah (*plus*) standar kearifan lokal ke-NU-an, yaitu mencakup mata pelajaran Ke-Aswaja-an dan nilai-nilai ke-NU-an.³⁸

³⁶ Mohamad Ali, *Pemikiran Pendidikan Muhammadiyah dalam Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*, 13

³⁷ Mohamad Ali, *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah* (Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2010), 34-35.

³⁸ Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Moderat di Indonesia, *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman* Volume 9 Nomor 1, (September 2014), 1

- a. Pondok Pesantren Salaf/Klasik, yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf (*weton dan sorogan*) dan sistem klasikal (madrasah) salaf.
- b. Pondok Pesantren Semi Berkembang, yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat pendidikan salaf (*weton dan sorogan*) dan sistem klasikal (madrasah) swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum.
- c. Pondok Pesantren Berkembang, yaitu pondok pesantren seperti semi berkembang, hanya saja sudah lebih variasi bidang kurikulumnya, yakni 70% agama dan 30% umum, disamping itu juga diselenggarakan madrasah SKB Tiga Menteri dengan penambahan *diniyah*.
- d. Pondok Pesantren Khalaf/Modern, yaitu seperti bentuk pondok modern berkembang, hanya saja sudah lebih lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, antara lain diselenggarakannya sistem sekolah umum dengan penambahan *diniyah* (praktek membaca kitab *salaf*), perguruan tinggi (baik umum maupun agama), bentuk koperasi dan dilengkapi *takhasus* (bahasa Arab dan Inggris).
- e. Pondok Pesantren Ideal, yaitu sebagaimana bentuk pesantren modern, hanya saja lembaga pendidikan yang ada lebih lengkap terutama bidang ketrampilan yang meliputi pertanian, teknik, perikanan, perbankan, dan lainnya, serta benar-benar

pelajaran keterampilan, disamping mata pelajaran agama. Keterampilan ditujukan untuk bekal kehidupan bagi seorang santri apabila sudah tamat dari pesantren. Keterampilan yang diajarkan meliputi pertanian, pertukangan, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. *Kelima*, pola dengan materi yang diajarkan berupa pengajaran kitab-kitab klasik, terdapat pendidikan model madrasah, selain mengajarkan mata pelajaran agama juga mengajarkan mata pelajaran umum.

Sedangkan Kurikulum pesantren Khalaf/Modern dapat dibagi dalam dua macam, yaitu kurikulum yang dibuat oleh pondok sendiri dan kurikulum pemerintah dengan memodifikasi pelajaran agama. Pola modifikasi ini akhirnya melahirkan model pesantren seperti Pondok Pesantren Salafy Terpadu Ar-Risalah dan Ammanatul Ummah yang dilengkapi dengan sekolah umum (SD, SMP, SMA) yang dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional atau (MI, MTS, MA) yang dibina oleh kementerian Agama. Menurut Yacub, sebagaimana yang dikutip oleh Khozin mengatakan bahwasannya ada beberapa pembagian pondok pesantren dan tipologinya: *Pertama*, Pesantren Salaf, yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pelajarannya dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Model pengajarannya pun sebagaimana yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf, yaitu sorogan dan weton. *Kedua*, Pesantren Khalafi yaitu pesantren yang

tentunya sesuai dengan dinamika kehidupan dan tuntutan masyarakat yang menginginkan anaknya memiliki ketrampilan disatu sisi, namun tetap memiliki pedoman keagamaan yang kuat. Disisi lain pesantren ideal juga relevan dengan konteks pendidikan nasional, dimana telah mengadopsi sistem pendidikan formal sebagaimana yang diselenggarakan pemerintah.

Pada umumnya pendidikan formal yang didirikan pesantren masih berada pada jalur pendidikan Islam, yakni Madrasah Diniyah (MD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), namun banyak pula pesantren yang telah memiliki lembaga pendidikan yang dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yakni, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Beberapa pesantren bahkan sudah membuka perguruan tinggi baik institut, sekolah tinggi maupun universitas, seperti Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pesantren Darul Ulum Jombang, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Pondok Pesantren Salafy Terpadu Lirboyo Kediri, dan masih banyak lainnya. Pesantren-pesantren tersebut dalam kurikulum dan sistem pembelajarannya memadukan model pembelajaran klasik atau tradisional dan pembelajaran modern dengan perubahan sistem pengajaran, yang semula berpusat pada kiai, kini sudah merekrut lulusan-lulusan pesantren atau perguruan tinggi Islam untuk menjadi ustadz di pesantren tersebut. Dari aspek

Sehingga saat pulang di Indonesia mereka melakukan pengembangan institusi pendidikan baru yang disebut madrasah dengan menerapkan metode dan kurikulum yang baru juga.

Dari sinilah terjadinya perubahan mendasar dalam dinamika Islam di Indonesia. Kemunculan madrasah dipandang oleh sejarawan pendidikan sebagai salah satu bentuk pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Argumen ini secara historis dinyatakan bahwa kemunculan madrasah didorong karena dua situasi yakni, pembaruan Islam di Indonesia dan adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda.

Secara historis keberadaan madrasah di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan situasi politik yang berkembang. Pada masa kolonial madrasah tumbuh dan berkembang secara separatis tanpa dikoordinasi oleh pemerintah, dengan demikian keadaan madrasah beranekaragam bentuknya. Setelah Indonesia merdeka pengelolaan madrasah berada di tangan pemerintah yakni Departemen Agama waktu itu. Sejak Indonesia merdeka terjadi tiga fase perkembangan madrasah. *Pertama*, fase antara tahun 1945-1974. Pada fase ini madrasah lebih terkonsentrasi pada pengajaran ilmu agama, karena itu ijazahnya hanya berlaku di kalangan kementrian agama.

Kedua, antara tahun 1975-1989 yang disebut fase pemberlakuan SKB 3 Menteri, (Surat Keputusan Bersama 3

Menurut analisis penulis ada beberapa aspek perbedaan diantaranya; madrasah dibina oleh Kemenag dan sekolah oleh Diknas, kurikulum madrasah muatan agamanya lebih banyak dari pada sekolah, saat pelaksanaan otonomi daerah Diknas termasuk sektor yang diotonomikan, sementara Kemenag masih sentralisasi, sekolah dari sektor anggaran masih prioritas utama, konsep sekolah lebih jelas dan baku, manajemen sekolah yang terdiri dari manajemen kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, sarpras, keuangan, bimbingan dan konseling, humas lebih dulu tertata, sebab memang mendapat perhatian utama dari pemerintah.

E. Pengembangan Pendidikan Islam

1. Pengertian Pengembangan Pendidikan Islam

Istilah pengembangan memang bisa digunakan dalam berbagai aspek yang bermuara pada peningkatan suatu program atau pencapaiannya suatu hasil. Pengembangan dalam konteks pendidikan bisa bermakna kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif pengembangan pendidikan punya makna bagaimana menjadikan jam pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang semula hanya dua jam pelajaran bisa menjadi tiga atau empat jam pelajaran. Sedangkan secara kualitatif pengembangan pendidikan Islam punya makna bagaimana menjadikan pendidikan agama Islam lebih baik, lebih bermutu dan lebih maju sejalan ide-ide dasar dan nilai-nilai Islam itu

pengetahuan dan teknologi serta seni dan sebagainya dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan nonagama.

Kedua, Model Mekanisme, model ini memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak. Aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan itu sendiri terdiri atas: nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetika, nilai biofisik, dan lain-lain. Dengan demikian, aspek atau nilai agama merupakan salah satu aspek atau nilai kehidupan dan aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan lainnya.

Ketiga, model organism/sistemik, dalam konteks pendidikan Islam, model organism bertolak dan pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Pandangan semacam itu menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dan *fundamental doctrine* dan *fundamental values* yang tertuang dan

melakukan transformasi. Pesantren dalam melakukan transformasi ada empat model diantaranya:¹¹⁸ *Pertama*, pesantren dengan model integrasi penuh, di sini watak dan sistem pendidikan pesantren *salafiyah* dipertahankan sepenuhnya, dan sistem pendidikan sekolah, madrasah, atau universitas pun diselenggarakan sepenuhnya. Model ini yang dilakukan pesantren Darul Ulum Jombang.

Kedua, pesantren dengan model integrasi selektif disini watak dan sistem pendidikan pesantren *salafiyah* dipertahankan, tetapi mengadopsi sistem pendidikan madrasah atau sekolah, sebagai instrumen untuk mengorganisir belajar, tidak mengadopsi kurikulumnya. Seperti yang dilakukan pesantren Maslakul Huda, Pati, Jawa Tengah, dan pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. *Ketiga*, model pesantren dengan integrasi instrumental, disini watak dan sistem pendidikan pesantren *salafiyah* dimodifikasi dengan tekanan pada bahasa asing, dan menggunakan madrasah sebagai instrumen pengorganisasian belajar. Seperti yang dilakukan Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. *Keempat*, pesantren dengan model integrasi minimal, di sini pesantren dimodifikasi hanya sebagai instrumen pendidikan berasrama, sedangkan pola pendidikan yang dikembangkan berdasarkan sistem madrasah atau sekolah. Seperti Pesantren *Darul Najah*, Jakarta.¹¹⁹

¹¹⁸ Affandi Muchtar, *Membedah Diskursus Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalimah, 2001), hlm. 130-131.

¹¹⁹ Nurhadi, "Integrasi Sekolah ke dalam Sistem Pendidikan Pesantren", *Edukasi*, Volume 04, Nomor 01, (Juni 2016), 18

yakni pembagian kelompok ilmu, ada ilmu agama atau ilmu Islam dan ilmu non Islam atau ilmu umum, yang akhirnya memunculkan dikotomi dalam lembaga pendidikan. Akibatnya muncul sekolah-sekolah agama dan sekolah umum berbasis ilmu pengetahuan umum. Munculnya sekolah-sekolah umum pada satu sisi, dan madrasah serta pesantren yang mewakili sekolah agama pada sisi lain merupakan wujud kongkrit dikotomi pendidikan Islam.¹²¹ Untuk itulah dikotomi dalam lembaga pendidikan di Indonesia harus segera kita akhiri dengan membentuk pola baru yakni adanya integrasi sekolah dan madrasah dalam sistem atau institusi pesantren.

Pesantren yang semula sebagai institusi keagamaan yang bersifat tradisional, para santri hidup dengan kesederhanaan, sangat taat pada kyai dan materi pengajaran hanya berdasarkan pada teks-teks Arab.¹²² Para santri kini harus menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang begitu cepat dengan melakukan rekonstruksi sistem pendidikannya. Salah satunya dengan mendirikan sekolah atau madrasah yang terintegrasi ke dalam sistem pesantren. Pesantren yang demikian ini termasuk jenis pesantren yang menemukan konsep dan cita-cita baru yakni “Perluasan konsep dan cita-cita pendidikan Islam tradisional yang tertumpu pada upaya melahirkan kyai kemudian mengalami perluasan

¹²¹ Azzumardi Azra, *Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam*, dalam Abdul Munir Mulkhani Dkk, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 80

¹²² Dindin Solahudin, *The Islamic Creativity of Pesantren Daarut Tauhid in Bandung, Java*, A Thesis Submitted In Partial Fulfilment Of The Degree of Master of Arts in the Department of Archaeology and Anthropology Faculty of Arts The Australian National University (Australia ,ANU E Press The Australian National University Canberra , 1996), 3

semester, ujian sekolah dan ujian nasional. Namun, hal tersebut tidak sama sekali meninggalkan esensi dari pondok pesantren itu sendiri yang tetap memberikan penguatan terhadap ajaran-ajaran agama Islam pada siswanya.

Salah satu alasan yang mendasari penyesuaian pondok pesantren terhadap kurikulum pendidikan nasional adalah agar lulusan pondok pesantren dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan adanya ijazah yang setara dengan lembaga pendidikan formal lain. Sehingga, dengan kata lain pondok pesantren berupaya tampil sebagai lembaga pendidikan yang memberikan dasar yang kokoh terhadap peserta didiknya berupa nilai-nilai agama dan juga memberikan kemampuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia memiliki andil besar terhadap pendidikan dan sejarah perjalanan bangsa dan turut serta menjadi agen dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Krisis multi dimensi dalam berbagai aspek kehidupan salah satu faktor yang harus dibenahi adalah aspek pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari gedung yang megah, sarana prasarana yang memadai, nilai ujian nasional tinggi, namun yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan generasi muda yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,

Berdasar realitas sosial di atas, dirasa sangat mendesak untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang ideal dengan keseimbangan intelektual dan spiritual dalam bentuk pesantren ideal dengan sistem *boarding school*. Hal ini tentunya sesuai dengan dinamika kehidupan dan tuntutan masyarakat yang menginginkan anaknya memiliki keterampilan di satu sisi, namun tetap memiliki pedoman keagamaan yang kuat. Disisi lain pesantren ideal juga relevan dengan konteks pendidikan nasional, dimana telah mengadopsi sistem pendidikan formal sebagaimana yang diselenggarakan pemerintah.

Pada umumnya pilihan pendidikan formal yang didirikan pesantren masih berada pada jalur pendidikan Islam, yakni Madrasah Diniyah (MD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), namun banyak pula pesantren yang telah memiliki lembaga pendidikan yang dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yakni, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Penataan dan pengembangan pendidikan Islam haruslah bersifat komprehensif dan menyeluruh, baik pada tingkat konsep maupun penyelenggaraan.